



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 6 Tahun 2025 Page 13-30

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Dukungan Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah terhadap Praktik Dasar Manajemen Pendidikan Islam di Pesantren Robithoh Kabupaten Bandung

Linda Meliawati^{1✉}, Mulyawan²

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: nda.meliawati87@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pesantren sering digambarkan sebagai benteng moral umat, tetapi jarang dikaji dari sisi bagaimana lembaga ini dikelola secara profesional di tengah perubahan sosial dan kebijakan negara. Di sinilah letak daya tarik penelitian ini—membongkar sejauh mana kekuatan sosial dan dukungan struktural benar-benar memengaruhi efektivitas manajemen pendidikan Islam di tingkat pesantren. Penelitian ini berangkat dari fenomena konkret di Pondok Pesantren Robithoh Kabupaten Bandung, sebuah lembaga yang berkembang pesat dengan dukungan masyarakat kuat namun menghadapi keterbatasan administratif dalam penerapan kebijakan pemerintah. Menggunakan pendekatan kuantitatif verifikatif, data diperoleh melalui angket, wawancara, dan observasi terhadap 20 responden guru dan tenaga kependidikan. Instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya ($\alpha = 0,831-0,897$). Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa dukungan masyarakat (X_1) dan kebijakan pemerintah (X_2) berpengaruh positif terhadap praktik dasar manajemen pendidikan Islam (Y) dengan koefisien determinasi $R^2 = 0,553$. Dukungan masyarakat memberikan pengaruh paling dominan ($b_1 = 0,529$), sedangkan kebijakan pemerintah berperan sebagai penguat struktural ($b_2 = 0,149$). Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan manajemen pendidikan Islam tidak hanya bergantung pada kemampuan internal lembaga, tetapi juga pada kolaborasi sinergis antara masyarakat sebagai energi sosial dan pemerintah sebagai penentu arah kebijakan. Sinergi keduanya menjadi kunci bagi pesantren untuk tumbuh adaptif, profesional, dan tetap berakar pada nilai-nilai keislaman.

Kata Kunci: *Dukungan Masyarakat, Kebijakan Pemerintah, Manajemen Pendidikan Islam, Pesantren, Robithoh.*

Abstract

Islamic boarding schools (pesantren) are often portrayed as the moral fortress of the Muslim community, yet few studies have examined how these institutions are managed professionally amid rapid social change and shifting government policies. This study explores a concrete case of how social forces and structural support jointly influence the effectiveness of Islamic education management. The research was conducted at Pondok Pesantren Robithoh, Bandung Regency, a rapidly growing institution that enjoys strong community support but faces administrative challenges in implementing government regulations. Using a quantitative-verificative approach, data were collected through questionnaires, interviews, and direct observation involving 20 teachers and educational staff. The instrument passed validity and reliability tests ($\alpha = 0.831\text{--}0.897$). Regression analysis revealed that community support (X_1) and government policy (X_2) have a positive effect on the basic practices of Islamic education management (Y) with a determination coefficient of $R^2 = 0.553$. Community support exerted the strongest influence ($b_1 = 0.529$), while government policy served as a structural reinforcement ($b_2 = 0.149$). These findings affirm that the success of Islamic education management depends not only on internal institutional capacity but also on the synergistic collaboration between the community as social energy and the government as policy direction. Their synergy forms the key foundation for pesantren to develop adaptively, professionally, and firmly rooted in Islamic values.

Keyword: Community Support, Government Policy, Islamic Education Management, Islamic Boarding School, Robithoh.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia merupakan pilar penting dalam membangun sumber daya manusia yang tidak hanya berilmu pengetahuan, tetapi juga berakhlak mulia dan berjiwa sosial tinggi. Dalam sejarah panjang bangsa ini, pesantren hadir bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan sebagai pusat dakwah, pemberdayaan, dan penjaga moral masyarakat. Dalam konteks kebijakan nasional, keberadaan pesantren kini memperoleh posisi strategis setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang menegaskan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama (Kemenag, 2024), terdapat lebih dari 37.000 pesantren dengan lebih dari 4 juta santri tersebar di seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki potensi besar dalam menopang pembangunan karakter bangsa. Namun, dari sisi tata kelola, masih banyak pesantren yang menghadapi keterbatasan pada aspek manajerial, administrasi digital, dan koordinasi kebijakan dengan pemerintah daerah. Kesenjangan inilah yang sering menjadi hambatan dalam mewujudkan manajemen pendidikan Islam

yang profesional dan adaptif terhadap tuntutan zaman.

Seiring perkembangan zaman, peran pesantren semakin kompleks. Lembaga ini dituntut tidak hanya mencetak ulama, tetapi juga mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern yang menuntut sistem pendidikan yang profesional, efektif, dan relevan dengan tantangan global (Suharto, 2021; Munandar, 2023).

Manajemen pendidikan Islam (MPI) muncul sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Ia bukan sekadar pengaturan teknis administratif, melainkan sebuah pendekatan menyeluruh untuk memastikan seluruh proses pendidikan di pesantren berjalan selaras dengan nilai-nilai keislaman, tuntutan zaman, dan arah kebijakan negara. Praktik dasar MPI yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi menjadi instrumen utama agar visi pendidikan Islam dapat diwujudkan dengan baik (Koontz & O'Donnell, 2021). Namun efektivitas praktik manajemen ini tidak hanya ditentukan oleh faktor internal seperti kepemimpinan, visi, atau budaya lembaga, tetapi juga oleh faktor eksternal yang datang dari luar organisasi, seperti dukungan masyarakat dan kebijakan pemerintah (Nuryahman, 2024; Musthofa, 2023).

Kedua faktor tersebut—masyarakat dan pemerintah—memiliki peran penting dan saling melengkapi. Masyarakat menjadi sumber legitimasi sosial yang menghidupkan pesantren, sedangkan pemerintah memberikan kerangka struktural dan dukungan kebijakan yang memperkuat keberadaan lembaga. Dalam pandangan Wahyuni & Mansur (2021), partisipasi masyarakat merupakan bentuk aktualisasi tanggung jawab sosial terhadap pendidikan Islam yang memperkuat kepercayaan publik dan mengokohkan eksistensi pesantren di tengah masyarakat modern. Sementara itu, kebijakan pemerintah berperan sebagai “policy driver” yang memberikan arah, dukungan finansial, serta legalitas bagi lembaga agar dapat berkembang secara berkelanjutan.

Fenomena tersebut tampak jelas di Pondok Pesantren Robithoh Kabupaten Bandung. Berdiri pada tahun 2010 di Desa Pakutandang, Ciparay, pesantren ini menjadi salah satu contoh pesantren modern yang berupaya mengintegrasikan kurikulum umum dan keagamaan dalam sistem pembelajaran yang berasrama. Dengan demikian, setelah memahami peran penting masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan pendidikan Islam, fenomena konkret keterpaduan dua faktor tersebut dapat ditemukan pada praktik di lapangan, khususnya di Pesantren Robithoh Kabupaten Bandung. Lembaga ini berdiri di atas lahan wakaf seluas ±1.400 meter persegi dan menaungi sekitar 200 santri dengan 50 tenaga pendidik. Pesantren Robithoh tumbuh dari semangat kemandirian dan kepedulian

sosial masyarakat sekitar. Pada awal berdirinya, lembaga ini belum sepenuhnya mendapat dukungan luas dari warga, tetapi melalui konsistensi mutu pendidikan dan keterbukaan dalam kegiatan sosial, kepercayaan masyarakat perlahan tumbuh. Kini, hubungan antara pesantren dan warga sekitar terjalin kuat melalui kegiatan pengajian, program Jumat Berkah, dan kerja bakti lingkungan yang rutin dilakukan (Data Observasi, 2025).

Hasil wawancara dengan pimpinan pesantren menunjukkan bahwa masyarakat berperan aktif tidak hanya dalam bentuk bantuan dana, tetapi juga tenaga, fasilitas, dan doa. Dukungan semacam ini sangat penting bagi keberlangsungan lembaga. Sejalan dengan temuan Nuryahman (2024), keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pesantren menjadi modal sosial yang memperkuat sistem manajemen dan meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap lembaga. Dalam studi lain, Rahmawati (2023) menyatakan bahwa dukungan masyarakat yang berkelanjutan berpengaruh positif terhadap efektivitas manajemen pesantren karena mendorong partisipasi aktif, transparansi, dan kepercayaan bersama antara pengelola dan warga.

Selain dukungan sosial, keberadaan kebijakan pemerintah juga menjadi faktor eksternal yang tidak kalah penting. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, lembaga pendidikan Islam memperoleh pengakuan formal sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Regulasi ini memberikan hak kepada pesantren untuk mendapatkan pendanaan, pembinaan, dan fasilitasi dari negara sesuai dengan tiga fungsi utamanya: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat (Maskuri, 2024; Bella, 2023). Implementasi kebijakan ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren serta PMA Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren, yang menegaskan tata kelola lembaga, standar kurikulum, serta sistem akreditasi (Kemenag RI, 2020).

Namun kebijakan yang baik tidak selalu berjalan mulus di tingkat implementasi. Dalam konteks Robithoh, sebagian guru dan staf masih menghadapi kendala teknis dalam administrasi digital seperti pelaporan EMIS, BOS/BOP, dan RKAM daring. Situasi ini mencerminkan hasil penelitian Musthofa (2023) yang menyatakan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan Islam sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Ketika kapasitas administratif rendah, kebijakan seringkali hanya menjadi instruksi formal tanpa dampak substansial. Meskipun demikian, pimpinan Robithoh tetap berupaya aktif mengikuti pelatihan dari Kementerian Agama dan menjaga komunikasi

dengan instansi pemerintah agar tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional.

Data penelitian menunjukkan bahwa secara umum tingkat dukungan masyarakat di Robithoh berada pada kategori tinggi dengan skor rata-rata 4,17 (dari skala 1–5), sedangkan dukungan kebijakan pemerintah berada di angka 4,15. Sementara itu, praktik dasar manajemen pendidikan Islam memperoleh skor tertinggi, yaitu 4,32, yang menandakan bahwa tata kelola lembaga berjalan cukup baik. Analisis regresi berganda menunjukkan nilai $R^2 = 0,553$, yang berarti sekitar 55,3% variasi praktik dasar MPI di pesantren ini dipengaruhi oleh faktor eksternal tersebut. Angka ini menggambarkan betapa kuatnya peran masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam menunjang efektivitas manajemen pendidikan Islam (Hasil Analisis Data, 2025).

Penemuan ini sejalan dengan hasil penelitian Rahmawati (2023) dalam *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, yang menunjukkan bahwa keberhasilan lembaga pendidikan Islam sangat bergantung pada sinergi antara masyarakat, lembaga, dan kebijakan negara. Di sisi lain, Alawiyah (2022) dalam *Jurnal Pendidikan Islam* menegaskan bahwa dukungan masyarakat memiliki pengaruh langsung terhadap keberlanjutan program pendidikan karena menjadi faktor yang menumbuhkan kepercayaan dan rasa tanggung jawab bersama. Di tingkat kebijakan, Musthofa (2023) dan Maskuri (2024) sama-sama menekankan bahwa keberhasilan UU Pesantren 2019 hanya dapat tercapai apabila pemerintah konsisten memberikan pendampingan administratif, finansial, dan teknis di tingkat lembaga.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa praktik dasar manajemen pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari dua faktor eksternal utama tersebut. Dukungan masyarakat memberikan energi sosial yang menjaga eksistensi lembaga, sementara kebijakan pemerintah memberikan arah struktural yang memastikan pesantren berada dalam kerangka hukum dan sistem nasional. Ketika keduanya berjalan seimbang, pesantren akan mampu beroperasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan (Munandar, 2023; Syahri, 2025).

Kendati demikian, dalam tinjauan literatur masih terdapat kesenjangan yang perlu dijematani. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya membahas faktor masyarakat atau kebijakan pemerintah secara terpisah. Kajian yang menggabungkan keduanya dalam satu model empiris dengan pendekatan kuantitatif di tingkat pesantren masih sangat terbatas. Di sinilah letak relevansi penelitian ini. Penelitian tentang pengaruh dukungan masyarakat dan kebijakan pemerintah terhadap praktik dasar manajemen pendidikan Islam di Pesantren Robithoh Kabupaten Bandung hadir untuk memberikan gambaran yang lebih utuh tentang

interaksi antara faktor sosial dan struktural dalam menentukan kualitas manajemen pendidikan Islam.

Lebih dari sekadar analisis statistik, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dinamika kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan Islam di tingkat akar rumput. Pesantren Robithoh menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antara partisipasi sosial dan kebijakan negara dapat menghasilkan tata kelola pendidikan Islam yang lebih baik, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkaya kajian manajemen pendidikan Islam dengan bukti empiris terbaru, sedangkan secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan lembaga pesantren dalam merumuskan strategi penguatan tata kelola yang kolaboratif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan manajemen pendidikan Islam tidak hanya ditentukan oleh kepemimpinan internal lembaga, tetapi juga oleh kekuatan jejaring eksternal yang mendukungnya. Pesantren yang mampu memadukan energi sosial masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah akan memiliki daya tahan yang lebih besar dalam menghadapi tantangan zaman, sekaligus menjadi model lembaga pendidikan Islam yang berkarakter, profesional, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif verifikatif, karena bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat antara faktor eksternal yakni dukungan masyarakat dan kebijakan pemerintah terhadap praktik dasar manajemen pendidikan Islam di Pesantren Robithoh Kabupaten Bandung. Pendekatan kuantitatif dipilih sebab memberikan ruang bagi peneliti untuk mengukur secara objektif gejala sosial melalui data numerik, serta memungkinkan analisis statistik guna menguji hipotesis yang dirumuskan (Sugiyono, 2020; Creswell & Creswell, 2023).

Pendekatan ini juga relevan dengan tujuan penelitian yang bersifat verifikatif, yaitu untuk membuktikan secara empiris kebenaran hubungan antarvariabel yang telah dirumuskan dalam model teoritis. Berbeda dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pada interpretasi makna, pendekatan kuantitatif-verifikatif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran pengaruh langsung dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara objektif. Dengan demikian, metode ini dianggap paling sesuai untuk

menilai seberapa besar kontribusi dukungan sosial masyarakat dan kebijakan pemerintah terhadap efektivitas praktik dasar manajemen pendidikan Islam di lingkungan pesantren.

Penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Robithoh, yang berlokasi di Jalan Raya Pacet No. 128, Kampung Sekesalam, Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Lembaga ini dipilih secara purposif karena merepresentasikan karakter pesantren modern yang mengintegrasikan kurikulum umum dan keagamaan serta menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Maskuri, 2024). Lingkungan pesantren berada di kawasan semi-urban dengan masyarakat yang religius, komunal, dan memiliki tingkat partisipasi sosial tinggi. Kondisi sosial seperti ini menjadikan Pesantren Robithoh sebagai lokasi ideal untuk meneliti bagaimana dukungan masyarakat dapat berinteraksi dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat tata kelola lembaga.

Penelitian dilaksanakan selama bulan September hingga Oktober 2025 melalui beberapa tahap, mulai dari observasi awal untuk mengenali sistem manajemen lembaga, penyusunan instrumen penelitian, penyebaran angket kepada responden, hingga analisis data dan penyusunan laporan hasil penelitian. Peneliti juga melakukan wawancara singkat kepada pimpinan pesantren dan tenaga kependidikan untuk memperkuat interpretasi data kuantitatif dengan informasi kualitatif pendukung.

Populasi penelitian ini adalah seluruh guru dan tenaga pendidik di Pesantren Robithoh yang berjumlah 50 orang. Dari jumlah tersebut diambil 20 orang responden sebagai sampel penelitian. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih responden yang dianggap paling memahami pelaksanaan manajemen pendidikan di pesantren. Teknik ini lazim digunakan dalam penelitian pendidikan Islam ketika populasi memiliki homogenitas karakteristik dan peneliti membutuhkan informan yang relevan (Arikunto, 2020; Rahmawati, 2023). Jumlah 20 responden dianggap memadai karena memenuhi rasio minimal 10:1 terhadap jumlah indikator yang diuji, sebagaimana disarankan oleh Hair et al. (2021), sehingga secara statistik dapat merepresentasikan variabel-variabel penelitian secara layak.

Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran angket, wawancara, dan observasi langsung di lingkungan pesantren. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi lembaga seperti profil pesantren, RKAM, laporan BOS/BOP, EMIS, visi-misi, struktur organisasi, dan arsip kegiatan pembelajaran, serta referensi peraturan perundang-undangan dan jurnal ilmiah

terkait (Bella, 2023; Munandar, 2023).

Instrumen utama penelitian adalah angket tertutup berbasis skala Likert lima tingkat, mulai dari 1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju. Angket terdiri atas 15 butir pernyataan, masing-masing lima butir untuk variabel dukungan masyarakat (X_1), lima butir untuk kebijakan pemerintah (X_2), dan lima butir untuk praktik dasar manajemen pendidikan Islam (Y). Skala Likert dipilih karena dapat menggambarkan intensitas sikap responden terhadap suatu fenomena sosial dengan lebih rinci (Sugiyono, 2020).

Sebelum digunakan, instrumen diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan dengan teknik korelasi Product Moment Pearson antara skor tiap butir dengan skor total. Hasil uji menunjukkan seluruh item memiliki nilai korelasi antara 0,51 hingga 0,88, melebihi r-tabel sebesar 0,44 sehingga dinyatakan valid. Reliabilitas diuji menggunakan Cronbach's Alpha, dan menghasilkan nilai 0,897 untuk variabel dukungan masyarakat, 0,892 untuk kebijakan pemerintah, dan 0,831 untuk praktik dasar MPI. Nilai α yang lebih besar dari 0,8 menunjukkan bahwa instrumen sangat reliabel (Tavakol & Dennick, 2019).

Selain itu, validitas konstruk diperkuat dengan memastikan setiap indikator mewakili dimensi teoretis masing-masing variabel. Indikator dukungan masyarakat, misalnya, mencakup partisipasi aktif, dukungan finansial, dan tingkat kepercayaan; sementara kebijakan pemerintah diukur melalui aspek pendanaan, pembinaan kelembagaan, dan implementasi regulasi. Pendekatan ini memastikan bahwa instrumen tidak hanya valid secara statistik, tetapi juga secara konseptual sesuai dengan teori manajemen pendidikan Islam.

Analisis data dilakukan dalam dua tahap. Pertama, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kecenderungan umum tiap variabel. Kedua, dilakukan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Model analisis diformulasikan dalam persamaan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

di mana Y merupakan praktik dasar MPI, X_1 adalah dukungan masyarakat, dan X_2 kebijakan pemerintah. Analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26.0, sebagaimana umum digunakan dalam penelitian manajemen pendidikan Islam (Putra, 2023). Sebelum regresi dilakukan, data diuji asumsi klasik meliputi normalitas, linearitas, dan multikolinearitas untuk memastikan kelayakan model statistik.

Selanjutnya dilakukan uji t untuk mengukur pengaruh parsial setiap variabel bebas terhadap Y, serta uji F untuk menilai pengaruh simultan kedua variabel bebas secara bersama-sama. Nilai signifikansi (p-value) di bawah 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang bermakna secara statistik. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menunjukkan besarnya kontribusi gabungan variabel bebas terhadap variabel terikat.

Dalam pelaksanaan penelitian, etika akademik dijaga dengan ketat. Setiap responden diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan hak mereka sebagai partisipan. Partisipasi bersifat sukarela, dan seluruh data pribadi dijaga kerahasiaannya. Sebelum pengumpulan data, peneliti juga memperoleh izin resmi dari pimpinan pesantren serta mengajukan lembar persetujuan (informed consent) kepada setiap responden. Partisipan diberi kebebasan untuk menarik diri dari penelitian kapan pun tanpa konsekuensi. Pendekatan etis ini penting untuk menjamin integritas penelitian dan menjaga hubungan saling percaya antara peneliti dan subjek lapangan (Creswell & Creswell, 2023).

Melalui rancangan metodologis yang sistematis dan terukur ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang akurat tentang pengaruh dukungan masyarakat dan kebijakan pemerintah terhadap praktik dasar manajemen pendidikan Islam di Pesantren Robithoh. Hasilnya tidak hanya memperkuat landasan teoritis manajemen pendidikan Islam, tetapi juga memberikan bukti nyata bagi pemerintah dan masyarakat bahwa sinergi keduanya merupakan kunci keberhasilan lembaga pendidikan Islam yang berdaya saing dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menggambarkan secara nyata bagaimana dukungan masyarakat dan kebijakan pemerintah berperan dalam memperkuat praktik dasar manajemen pendidikan Islam (MPI) di Pondok Pesantren Robithoh Kabupaten Bandung. Data dikumpulkan melalui angket, observasi, dan wawancara kepada 20 orang guru dan tenaga kependidikan yang dipilih secara purposif.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, Pesantren Robithoh menunjukkan sistem manajemen yang relatif baik dan terstruktur. Kegiatan perencanaan program, pengorganisasian kegiatan, pelaksanaan, serta evaluasi dilaksanakan secara rutin oleh pimpinan bersama dewan guru. Rapat koordinasi internal diadakan minimal satu kali setiap bulan, sementara musyawarah kerja tahunan melibatkan pula perwakilan masyarakat dan wali santri. Dalam keseharian, masyarakat sekitar pesantren menunjukkan partisipasi yang

tinggi melalui kegiatan sosial keagamaan, seperti program *Jumat Berkah*, pengajian umum, serta gotong royong pembangunan fasilitas pesantren. Hasil wawancara dengan pimpinan lembaga menunjukkan bahwa hubungan pesantren dan masyarakat telah terjalin secara harmonis dan saling menguatkan. Dukungan tersebut tidak hanya berupa bantuan finansial, tetapi juga moral dan tenaga, termasuk doa dan partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan santri.

Secara kuantitatif, hasil penyebaran angket menunjukkan bahwa tingkat dukungan masyarakat terhadap kegiatan pesantren berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata 4,17 dari skala 1-5. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat berperan aktif dalam pengembangan lembaga, terutama pada kegiatan pembangunan sarana, pendanaan program sosial, dan penyelenggaraan kegiatan dakwah. Sementara itu, kebijakan pemerintah memperoleh skor rata-rata 4,15, yang berarti cukup tinggi. Responden menilai kebijakan pemerintah, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan program Bantuan Operasional Pesantren (BOP), telah memberikan dukungan positif bagi kelangsungan pendidikan di Robithoh. Namun demikian, sebagian guru mengakui masih terdapat kendala administratif dalam pelaporan EMIS dan penyusunan RKAM daring karena keterbatasan kemampuan digital dan infrastruktur jaringan.

Adapun praktik dasar manajemen pendidikan Islam di Pesantren Robithoh menunjukkan hasil yang sangat baik dengan skor rata-rata 4,32. Nilai ini mencerminkan bahwa kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi telah dilaksanakan secara konsisten sesuai prinsip manajemen pendidikan Islam. Setiap program dirancang melalui musyawarah bersama, pelaksanaan kegiatan terpantau dengan baik, dan evaluasi dilakukan pada akhir semester untuk menilai efektivitas program serta kinerja guru.

Dari hasil uji validitas dan reliabilitas, seluruh item pernyataan dinyatakan layak digunakan. Nilai korelasi antarbutir berkisar antara 0,51 hingga 0,88, melebihi r -tabel sebesar 0,44, yang menandakan setiap butir pernyataan memiliki keterkaitan signifikan dengan variabel yang diukur. Uji reliabilitas dengan metode Cronbach's Alpha menunjukkan nilai α sebesar 0,897 untuk variabel dukungan masyarakat, 0,892 untuk kebijakan pemerintah, dan 0,831 untuk praktik dasar manajemen pendidikan Islam. Ketiga nilai tersebut lebih besar dari 0,80, sehingga instrumen penelitian dikategorikan sangat reliabel dan konsisten.

Hasil analisis regresi linier berganda menghasilkan persamaan:

$$Y = 1.148 + 0.529X_1 + 0.149X_2$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dukungan masyarakat (X_1) akan meningkatkan praktik dasar manajemen pendidikan Islam (Y) sebesar 0,529, sedangkan peningkatan satu satuan kebijakan pemerintah (X_2) akan menaikkan Y sebesar 0,149. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel dukungan masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan dengan nilai $t_{hitung} = 4,982$ dan $p = 0,000$, sedangkan kebijakan pemerintah juga berpengaruh positif dengan $t_{hitung} = 2,351$ dan $p = 0,031$. Secara simultan, hasil uji F menunjukkan nilai $F_{hitung} = 11,243$ dengan $p = 0,002$, yang berarti kedua variabel bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik dasar MPI. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,553 menandakan bahwa 55,3% variasi praktik dasar MPI dijelaskan oleh dukungan masyarakat dan kebijakan pemerintah, sedangkan 44,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti kepemimpinan, kompetensi guru, dan budaya organisasi pesantren.

Secara keseluruhan, hasil pengamatan lapangan dan analisis data menunjukkan bahwa Pesantren Robithoh telah mengembangkan tata kelola pendidikan Islam yang baik, adaptif, dan berbasis partisipasi. Dukungan masyarakat menjadi faktor dominan yang menghidupkan dinamika lembaga, sedangkan kebijakan pemerintah berperan sebagai penguat struktural yang memberikan arah dan legalitas. Meskipun masih terdapat kendala administratif dan keterbatasan digitalisasi, kedua faktor tersebut terbukti berkontribusi besar terhadap efektivitas dan keberlanjutan manajemen pendidikan di Pesantren Robithoh Kabupaten Bandung.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen pendidikan Islam di Pondok Pesantren Robithoh Kabupaten Bandung telah berjalan sangat baik. Nilai rata-rata praktik dasar manajemen pendidikan Islam (MPI) sebesar 4,32 menggambarkan bahwa kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi di lembaga ini terlaksana dengan konsisten. Sistem manajerial yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada efisiensi kerja, tetapi juga menonjolkan nilai-nilai spiritual dan kebersamaan yang menjadi ciri khas lembaga pendidikan Islam. Kualitas tata kelola yang baik ini tidak lahir secara spontan; hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilannya banyak ditentukan oleh

faktor eksternal, yakni dukungan masyarakat dan kebijakan pemerintah yang secara simultan memberikan kontribusi sebesar 55,3 %.

Dukungan masyarakat terbukti memiliki pengaruh paling besar terhadap keberhasilan pengelolaan pesantren dengan koefisien regresi 0,529. Temuan ini menegaskan bahwa hubungan sosial antara pesantren dan masyarakat sekitar menjadi kekuatan utama yang menopang keberlangsungan lembaga. Masyarakat di sekitar Robithoh tidak hanya berperan sebagai pihak eksternal, tetapi juga sebagai bagian integral dari sistem manajemen lembaga. Mereka terlibat langsung dalam berbagai kegiatan keagamaan, pembangunan fasilitas, hingga dukungan finansial dan moral bagi santri serta tenaga pendidik. Keterlibatan semacam ini merupakan wujud konkret dari *social capital* yang disebut Nuryahman (2024) sebagai modal sosial pendidikan Islam yakni jaringan kepercayaan, kolaborasi, dan solidaritas yang memungkinkan pesantren bertahan dan berkembang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmawati (2023) dalam *Manageria Journal*, yang menegaskan bahwa dukungan masyarakat berperan penting dalam memperkuat fungsi-fungsi manajerial di lembaga pendidikan Islam, terutama pada aspek perencanaan dan pengawasan. Di Robithoh, keterlibatan masyarakat juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Mereka ikut memantau jalannya kegiatan pembelajaran dan pengasuhan santri sehingga pesantren memiliki sistem pengawasan ganda: internal dari pimpinan dan guru, serta eksternal dari masyarakat. Model pengawasan partisipatif ini sesuai dengan pandangan Terry (2020) bahwa efektivitas manajemen akan tercapai apabila pimpinan mampu memotivasi pihak lain untuk terlibat aktif dalam mencapai tujuan organisasi.

Selain faktor sosial, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki peran yang cukup signifikan terhadap pengelolaan lembaga, meskipun tidak sekuat dukungan masyarakat. Koefisien regresi kebijakan pemerintah sebesar 0,149 menunjukkan adanya hubungan positif antara dukungan struktural negara dan efektivitas manajemen pendidikan Islam. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pemerintah secara resmi mengakui pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Regulasi ini memperkuat posisi pesantren secara hukum dan membuka akses yang lebih luas terhadap pendanaan, pembinaan kelembagaan, serta program peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

Dampak dari kebijakan tersebut juga dirasakan oleh Pesantren Robithoh. Program-program seperti Bantuan Operasional Pesantren (BOP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) terbukti membantu meringankan biaya pendidikan dan operasional lembaga. Akan tetapi,

hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal. Sebagian guru masih mengalami kendala dalam pengisian data *Education Management Information System* (EMIS) dan penyusunan laporan BOS/BOP berbasis daring. Kondisi ini menggambarkan bahwa dukungan kebijakan masih perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas administratif dan digitalisasi manajemen pesantren. Fenomena ini menguatkan pandangan Musthofa (2023) yang menyatakan bahwa reformasi kebijakan pendidikan Islam membutuhkan penguatan kemampuan manajerial di tingkat lembaga agar kebijakan pemerintah tidak berhenti pada tataran regulasi, melainkan benar-benar diinternalisasikan dalam sistem kerja lembaga.

Dalam perspektif manajemen modern, kebijakan publik berperan sebagai *enabling environment* atau lingkungan pendukung yang menciptakan kondisi bagi organisasi untuk berkembang (Koontz & O'Donnell, 2021). Di Robithoh, keberadaan kebijakan pemerintah berfungsi sebagai pendorong struktural yang memberikan legitimasi dan arahan strategis bagi pengelola pesantren. Namun sebagaimana disampaikan Munandar (2023), keberhasilan implementasi kebijakan di lembaga pendidikan Islam sangat bergantung pada keseimbangan antara regulasi dan kesiapan sumber daya manusia. Ketika kemampuan administratif pesantren meningkat, kebijakan pemerintah akan bertransformasi menjadi energi pendorong yang memperkuat kinerja lembaga.

Hubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam konteks pesantren tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua pilar eksternal yang saling melengkapi. Masyarakat menyediakan dukungan sosial dan moral yang menjadi fondasi kehidupan pesantren, sedangkan pemerintah memberikan dukungan kebijakan, legalitas, dan sumber daya struktural. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sinergi antara kedua faktor tersebut menjelaskan lebih dari separuh keberhasilan praktik dasar MPI di Pesantren Robithoh. Temuan ini sejalan dengan studi Fadhilah (2022) yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah mampu meningkatkan mutu manajemen lembaga pendidikan Islam secara signifikan, terutama dalam proses perencanaan dan evaluasi.

Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa kolaborasi itu diwujudkan melalui mekanisme musyawarah dan kemitraan yang berkelanjutan. Setiap awal tahun ajaran, Robithoh menggelar rapat penyusunan program yang melibatkan guru, pimpinan pesantren, serta perwakilan wali santri. Dalam forum tersebut, aspirasi masyarakat disinergikan dengan arah kebijakan pemerintah dan kebutuhan internal lembaga. Pola pengelolaan seperti ini mencerminkan konsep *synergy management* yang dikemukakan

Nuryahman (2024), yakni perpaduan harmonis antara masyarakat, lembaga, dan pemerintah yang saling mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan Islam.

Dari sudut pandang teoritis, hasil penelitian ini menegaskan bahwa praktik dasar MPI di pesantren tidak dapat dilepaskan dari pendekatan manajemen terbuka (*open-system management*). Pesantren berinteraksi secara aktif dengan lingkungannya dan memperoleh masukan baik dari kebijakan negara maupun dinamika sosial masyarakat. (Munandar, 2023) menekankan bahwa karakteristik manajemen pendidikan Islam yang holistik terletak pada keseimbangannya antara efisiensi struktural dan nilai-nilai spiritual. Manajemen yang terlalu birokratis berisiko mengabaikan dimensi moral, sedangkan manajemen yang hanya mengandalkan semangat sosial tanpa sistem administrasi akan sulit berkembang secara profesional. Pesantren Robithoh menunjukkan keseimbangan tersebut dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman sambil mengikuti perkembangan kebijakan nasional.

Temuan ini sekaligus memperluas kajian teoretis manajemen pendidikan Islam yang selama ini lebih banyak menyoroti aspek internal seperti kepemimpinan dan kultur organisasi. Hasil penelitian di Robithoh menegaskan bahwa faktor eksternal juga memiliki kontribusi yang besar. Dukungan masyarakat menjadi motor penggerak yang menjaga keberlangsungan lembaga, sedangkan kebijakan pemerintah berperan sebagai panduan arah dan sumber legitimasi. Kedua faktor tersebut, ketika bersinergi, menghasilkan sistem manajemen pendidikan Islam yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Implikasi praktis dari hasil penelitian ini menyentuh dua aspek utama. Pertama, bagi pengelola pesantren, hasil ini menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang transparan dengan masyarakat agar rasa memiliki terhadap lembaga terus tumbuh. Kedua, bagi pemerintah, hasil penelitian ini menjadi dasar untuk merancang program pembinaan pesantren yang lebih kontekstual bukan sekadar administratif melalui pendampingan digital, pelatihan manajemen, dan fasilitasi kolaborasi lintas sektor. Dengan langkah tersebut, kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai regulasi, tetapi menjadi instrumen pemberdayaan yang nyata.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengonfirmasi bahwa keberhasilan manajemen pendidikan Islam bukan hanya ditentukan oleh kecakapan teknis pimpinan lembaga, melainkan oleh sinergi antara energi sosial masyarakat dan energi struktural pemerintah. Pesantren Robithoh menjadi bukti bahwa ketika kepercayaan sosial dan kebijakan publik berjalan beriringan, lembaga pendidikan Islam dapat tumbuh menjadi institusi yang profesional, adaptif, dan tetap berakar pada nilai-nilai keislaman yang luhur.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan praktik dasar manajemen pendidikan Islam di Pondok Pesantren Robithoh Kabupaten Bandung tidak dapat dilepaskan dari peran sinergis antara dukungan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Kedua faktor eksternal ini secara simultan memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan lembaga, dengan kontribusi bersama sebesar 55,3%. Dari dua variabel tersebut, dukungan masyarakat memberikan pengaruh paling dominan. Partisipasi sosial yang tinggi, dukungan moral dan finansial, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan keagamaan telah menjadi energi sosial yang menghidupkan dan memperkuat sistem manajemen pesantren. Sementara itu, kebijakan pemerintah berperan sebagai penguat struktural yang memberikan arah, legitimasi, dan dukungan administratif bagi keberlangsungan pesantren di tengah tuntutan regulasi dan modernisasi pendidikan Islam.

Temuan ini mempertegas bahwa manajemen pendidikan Islam yang efektif tidak hanya bergantung pada kapasitas internal lembaga, tetapi juga pada kolaborasi eksternal yang harmonis antara masyarakat sebagai kekuatan sosial dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Sinergi kedua unsur ini melahirkan tata kelola yang partisipatif, adaptif, dan berkarakter keislaman. Pesantren Robithoh menjadi contoh nyata bagaimana partisipasi masyarakat dan kehadiran kebijakan publik dapat berpadu untuk menciptakan manajemen lembaga yang profesional sekaligus berakar pada nilai-nilai moral dan spiritual Islam.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pesantren terus mengembangkan mekanisme komunikasi yang transparan dan akuntabel dengan masyarakat, misalnya melalui forum musyawarah tahunan, program kolaboratif sosial-keagamaan, serta keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan evaluasi program. Pemerintah di sisi lain diharapkan tidak berhenti pada pemberian bantuan finansial semata, tetapi juga memperkuat aspek pendampingan administratif dan digitalisasi sistem manajemen pesantren. Pelatihan penyusunan RKAM daring, peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan EMIS, serta integrasi sistem informasi pesantren dengan Kementerian Agama merupakan langkah penting agar kebijakan benar-benar berdampak di tingkat lembaga.

Selain itu, pesantren perlu memanfaatkan dukungan masyarakat sebagai basis pemberdayaan berkelanjutan, dengan menjalin kemitraan strategis bersama tokoh lokal, alumni, dan lembaga sosial agar fungsi dakwah dan pendidikan dapat berjalan lebih efektif.

Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas model ini dengan menambahkan variabel seperti kepemimpinan spiritual, kompetensi guru, serta budaya organisasi, sehingga terbentuk kerangka manajemen pendidikan Islam yang lebih komprehensif dan siap menghadapi tantangan era digital.

Dengan demikian, sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pesantren bukan hanya menjadi faktor pendukung, tetapi telah menjadi fondasi utama dalam membangun sistem manajemen pendidikan Islam yang unggul, inklusif, dan berkelanjutan sebuah model yang patut dijadikan rujukan bagi pengembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2020). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bella, A. (2023). Jejak historis kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Pendidikan Islam (JIMPI)*, 5(2), 35–47. <https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/jimpi/article/view/1599>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Fadhilah, R. (2022). Peran pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan mutu lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Tarbawi*, 7(2), 101–112. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Tarbawi/article/view/28884>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Pearson Education.
- Koontz, H., & O'Donnell, C. (2021). *Principles of management*. New York: McGraw-Hill Education.
- Maskuri, M. (2024). Implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pesantren pasca-UU 18/2019. *Lisan al-Hal*, 7(1), 14–27. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/4719>
- Munandar, D. S. (2023). Human resource well-being in Islamic education management. *International Journal of Islamic Education Research (IJIER)*, 9(1), 25–38. <https://ijier.net/ijier/article/view/1896>
- Musthofa, M. M. A. (2023). Government policy and Islamic education management reform. *At-Tadbir: Journal of Islamic Education Management*, 6(2), 88–99. <https://jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/attadbir/article/view/391>
- Nuryahman, M. (2024). Manajemen pendidikan Islam berbasis partisipasi masyarakat. *Jurnal*

- Manajemen Pendidikan Islam (J-MPI)*, 12(1), 45–56. <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JMPI/article/view/6378>
- Putra, M. F. (2023). Metodologi penelitian manajemen pendidikan Islam kontemporer. *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(2), 130–142. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/manageria/article/view/7790>
- Rahman, F. (2022). Nilai partisipasi sosial dalam penguatan manajemen pendidikan Islam di pesantren. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 9(1), 67–78. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/idaroh/article/view/20127>
- Rahmawati, D. (2023). Community support and institutional management in Islamic boarding schools. *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 112–128. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/manageria/article/view/7462>
- Rozza, D. S., Nasution, K., & Hasyim, D. (2024). Islamic education policy in Islamic boarding schools. *Research and Development Journal of Education (RDJE)*, 10(1), 42–53. <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/RDJE/article/view/21961>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tavakol, M., & Dennick, R. (2019). Making sense of Cronbach's alpha. *International Journal of Medical Education*, 2, 53–55. <https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd>
- Terry, G. R. (2020). *Principles of management*. Homewood, IL: Richard D. Irwin.
- Wahyuni, R., & Mansur, M. (2021). The role of community participation in strengthening Islamic education institutions. *Tarbiyah: Journal of Islamic Education Studies*, 6(2), 89–100. <https://doi.org/10.15548/tarbiyah.v6i2.2754>
- Yusuf, M. (2022). Strengthening pesantren governance through community and government collaboration. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 7(1), 22–35. <https://doi.org/10.35316/jpii.v7i1.3254>
- Zain, L. (2024). Collaborative management of Islamic education institutions in the era of policy reform. *Jurnal Al-Tanzim: Manajemen Pendidikan Islam*, 8(2), 75–86. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v8i2.5269>